



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN
JALAN TRIPANDITA NO 15 MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmadNya Perubahan Rencana Strategis Transisi Dinas koperasi dan UM Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 dapat kami susun. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Propinsi. Pemerintah Kabupaten Magetan dengan persetujuan DPRD bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan menyusun Renstra Transisi Tahun 2024-2026. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Transisi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan.

Magetan,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGETAN



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang..... | 1 |
| Dasar Hukum | 2 |
| Maksud dan Tujuan | 3 |
| Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 6 |
| Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 6 |
| Sumberdaya OPD | 9 |
| Kinerja Pelayanan OPD | 12 |
| Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas | 28 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 29 |
| Identifikasikan permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Kemenetrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI, dan Telaah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur | 30 |
| Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 32 |
| Penentuan isu-isu strategis | 32 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 34 |
| Tujuan dan Sasaran OPD | 34 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 39 |
| Strategis dan Kebijakan OPD | 39 |
| BAB VI RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 41 |
| Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif OPD | 41 |
| BAB VII INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 51 |
| Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 51 |
| BAB VIII PENUTUP | 52 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabe. 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan | 9 |
| Tabel 2.2 | Data Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan | 10 |
| Tabel 2.3 | Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun | 10 |
| Tabel 2.4 | Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Displin Ilmu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan | 10 |
| Tabel 2.5 | Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun | 11 |
| Tabel TC.23 | Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018-2023..... | 13 |
| Tabel TC.24 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019-2023..... | 15 |
| Tabel 3.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UM RI | 31 |
| Tabel 3.2 | Identifikasi Isu Strategis..... | 33 |
| Tabel TC.25 | Tujuan dan sasaran RPD DINKOPUM Tahun 2024-2026..... | 35 |
| Tabel TC.26 | Tujuan dan Sasaran Strategi dana arah kebijakan..... | 39 |
| Tabel TC.27 | Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024-2026..... | 42 |
| Tabel TC,28 | Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 51 |
| Tabel 7.1 | IKU..... | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026), dan Kepala Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam empat tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap : persiapan penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 3 tahun ke depan (2024-2026), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM Propinsi Jawa Timur, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Magetan. Rencana strategis (Renstra) juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Karena ada perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventaris Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka kami lakukan Perubahan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019.
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/57 tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen PPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024.
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)
 29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 3 (Tiga) Tahun mendatang.
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan Tujuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu tiga tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
3. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2024 - 2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 - 2026
4. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
5. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.
6. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
7. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Magetan Ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian

Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia dan
Telaahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa
Timur

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Pada Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 88 Tahun 2021, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Sekretariat, terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- 4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,.
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro,.
- 6) UPTD.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, yaitu :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - d) pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e) pengelolaan urusan keuangan;
 - f) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
 - h) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan, pangkat, pensiun;
- g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

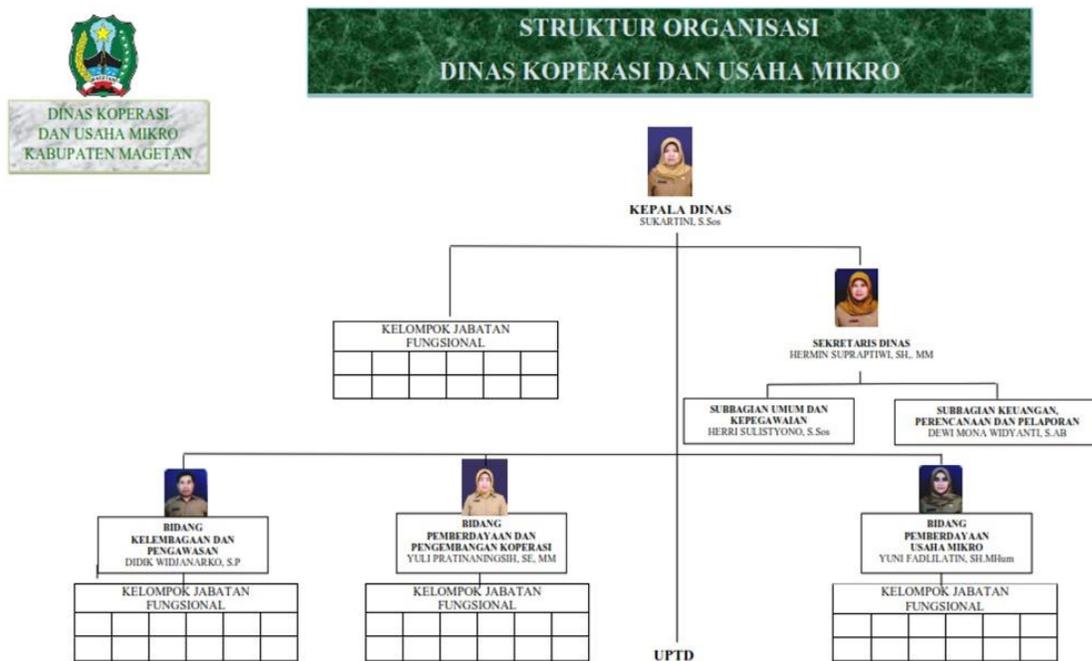
- a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- c) melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- f) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) menyusun laporan keuangan;
- i) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m) melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q) mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r) menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- 2) **Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin usaha koperasi;
 - c) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - d) pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - e) pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
 - f) pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotannya lintas daerah kabupaten/kota/provinsi;
 - g) pelaksanaan koordinasi kesehatan koperasi;
 - h) pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - i) pelaksanaan dan penyedia data penilaian kesehatan koperasi;
 - j) pelaksanaan penegakan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 3) **Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**, mempunyai tugas merumuskan, menyusun program kegiatan, melaksanakan kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha koperasi. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi;
 - b) pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c) pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat local dan nasional;
 - d) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e) pelaksanaan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - f) pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - g) pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) **Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro**, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
- a) pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b) pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - c) pelaksanaan pengembangan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - d) pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha

- mikro;
- e) pelaksanaan pendataan izin usaha mikro;
- f) pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- g) pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
- h) pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan lembaga/badan usaha;
- i) pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tabel 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan



Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan hingga akhir tahun 2022 sejumlah 22 Orang.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan hingga akhir tahun 2022 mencapai 31 orang, dengan rincian 22 orang berstatus PNS (70 persen) dan 9 orang Non PNS (30 persen). Dari total tersebut, 27 persen berjenis kelamin laki-laki dan 73 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 48 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 dan SLTA masing-masing sebesar 11 persen, dan 26 persen, serta yang berpendidikan SLTP sebanyak 3 persen dan untuk yang berpendidikan sarjana muda sebesar 7 persen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

| Unit Kerja | Eselon | | | PNS | | | |
|---|--------|-----|----|-------|--------|---------|--------|
| | IV | III | II | GOL I | GOL II | GOL III | GOL IV |
| Kepala Dinas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| - Sekretaris | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Kasubag Umum & Kepegawaian | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Kasubag Keuangan & PEP | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - Bidang Kelembagaan & Pengawasan | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| - Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Jumlah | 2 | 4 | 1 | - | - | 3 | 4 |

Tabel 2.3
Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

| No | Jabatan Struktural | Pangkat/Gol. Ruang | Pendidikan Formal | Jml | Ket |
|----|--------------------|--|-------------------|-----------|-----|
| 1 | Kepala Dinas | Pembina Tingkat I (IV/b) | S1 | 1 | - |
| 2 | Sekretaris | Pembina Tingkat I (IV/b) | S2 | 1 | - |
| 3 | Kepala Bidang | Pembina (IV/a) dan Penata Tingkat 1 (III/d) | S2 dan S1 | 3 | - |
| 4 | Ka. Sub. Bag | Penata Tingkat I (III/d) dan Penata Muda (III/b) | S1 | 2 | - |
| 5 | Fungsional | Penata Tingkat I (III/d) dan Penata (III/c) | S1 | 8 | - |
| 6 | Staf | Penata Muda (III/a) | SMA/S1 | 7 | - |
| | | - Tenaga Kontrak | SMA | 4 | - |
| | | - Tenaga Pendamping | S1 | 5 | - |
| | | J U M L A H | | 31 | |

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Ilmu
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

| No | Golongan | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | L | P | SLTP | SMA | D3 | S1 | S2 |
| 1 | Pembina Tingkat I (IV/b) | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Pembina (IV/a) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Penata Tingkat I (III/d) | 1 | 7 | - | - | - | 7 | 1 |
| 4 | Penata (III/c) | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 5 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Penata Muda (III/a) | 1 | 6 | - | 2 | - | 5 | - |
| 7 | Pengatur Tingkat I (II/d) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Pengatur (II/c) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Tenaga Kontrak | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 10 | Tenaga Pendamping | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - |
| | J u m l a h | 12 | 19 | - | 6 | - | 22 | 3 |

Asset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan akhir tahun 2022 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2022

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Merk/Model | Tahun Pembuatan/ Pembelian | Jml | Ket |
|----|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | - | | 1 | Jl. Tripandita No.15 |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 40.518 m2 | | 1 | Jl. Tripandita No. 15 Magetan |
| 3 | Station Wagon | Toyota KF 50 SPR | 1993 | 1 | |
| 4 | Station Wagon | Suzuki ST Futura 150 | 2001 | 1 | |
| 5 | Station Wagon | Toyota Innova | 2009 | 1 | |
| 6 | Sepeda motor | Yamaha 2 SV | 2014 | 3 | |
| 7 | Sepeda motor | Honda Versa GL 15 | 2015 | 1 | |
| 8 | Sepeda motor | Honda Supra X | 2015 | 1 | |
| 9 | Sepeda motor | Honda Supra X CW F1 | 2016 | 2 | |
| 10 | Mesin Tik | | | 0 | |
| 11 | Mesin Hitung | | | 0 | |
| 12 | Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | | | 24 | |
| 13 | Alat Kantor Lainnya | | | 14 | |
| 14 | Meubelair | | | 167 | |
| 15 | Alat Pembersih | | | 1 | |
| 16 | Alat Pendingin | | | 15 | |
| 17 | Home Use | | | 9 | |
| 18 | Pemadam Kebakaran | | | 0 | |
| 19 | Personal Komputer | | | 29 | |
| 20 | Peralatan Komputer mainframe | | | 0 | |
| 21 | Peralatan Mini Komputer | | | 4 | |
| 22 | Peralatan Personal komputer | | | 15 | |
| 23 | Meja Kerja Pejabat | | | 4 | |
| 24 | Meja Rapat Pejabat | | | 2 | |
| 25 | Kursi kerja pejabat | | | 4 | |
| 26 | Kursi rapat pejabat | | | 20 | |

| | | |
|----|------------------|---|
| 27 | Lemari dan Arsip | 3 |
| 28 | Peralatan studio | 5 |
| 28 | Alat Komunikasi | 2 |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan kinerja selama periode 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel TC. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2019 - 2022

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UM | Target SPM | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Renstra Dinkop Tahun ke n | | | | Realisasi Capaian Tahun ke n | | | | Rasio Capaian pada Tahun n | | | |
|----|---|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Nilai Omset Usaha Koperasi dan UM yang Dibina (Juta/Rp) | - | - | - | 685.625 | 740.500 | 801.790 | 873.840 | 870.110 | 801.884 | 941.770 | 1.098.536 | 120 | 101 | 110 | 120 |
| 2 | Persentase Koperasi Aktif (%) | - | - | - | 74 | 77 | - | - | 62,8 | 77 | - | - | 84 | 100 | | |
| 3 | Persentase Pertumbuhan koperasi yg berkualitas | - | - | - | | | 4,3 | 4,8 | | | 4,3 | 4,8 | | | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro | - | - | - | 0,74 | 0,89 | 0,98 | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 1,4 | 2,1 | 116 | 86 | 142 | 223 |
| 5 | Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru | - | - | - | 250 | 300 | - | - | 253 | 330 | - | - | 101 | 110 | | |

Dalam tabel TC. 23 diatas dapat dilihat bahwa fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rasio capaian target yang tinggi dan terus meningkat terutama untuk nilai omset usaha koperasi dan Usaha mikro, sedangkan untuk persentase koperasi aktif pada tahun 2018 s.d 2020 tidak tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola terutama dari sisi kemampuan managerial dan jiwa kewirausahaan pengelola Koperasi. Selain itu sesuai kebijakan pemerintah pusat, yang mendorong koperasi berkualitas bukan kuantitas, koperasi banyak yang dibubarkan (Keputusan Menkop UKM Nomer 153 tahun 2018). Dan untuk persentase pertumbuhan usaha mikro peningkatan dan capaian lebih dari 100%. Akan tetapi pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 terdapat pandemi *Covid 19* yang sangat berdampak terhadap perekonomian, tidak terkecuali Koperasi dan UMKM. Meskipun pada Tahun 2021 masih terdapat pandemi *Covid 19* namun pada Tahun 2021 telah dilakukan upaya untuk pemulihan ekonomi nasional.

Tabel TC 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2019 - 2023

| Program/Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke- | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | | | | |
|--|--|---------------|------|-------------|------|----|------|----|------|----|-----------------------------|-------------|------|-------------|------|----|------|----|------|----|------------------------------|-------|-------|-------|------|----|------|----|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | (7) | | (8) | | (9) | | (10) | | (11) | | (12) | | (13) | | (14) | | (15) | | (16) | | (17) | | (18) | | (19) | | (20) | |
| (3) | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 74 | 3,199,000,000 | 85 | 351,269,400 | | | | | | | 63 | 393,743,250 | 77 | 304,743,550 | | | | | | | 85.14 | 12.31 | 90.59 | 86.75 | - | - | - | - |
| Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi | 33 | 25,000,000 | 35 | 30,000,000 | | | | | | | 33 | 21,249,000 | 35 | 27,789,700 | | | | | | | 100 | 85 | 100 | 92.63 | - | - | - | - |
| Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian | 100 | 30,000,000 | 0 | - | | | | | | | 100 | 28,450,000 | 0 | - | | | | | | | 100 | 94.83 | - | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi berprestasi | 33 | 85,000,000 | 0 | - | | | | | | | 33 | 72,111,700 | 0 | - | | | | | | | 100 | 84.84 | - | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi | 100 | 125,000,000 | 130 | 160,000,000 | | | | | | | 100 | 104,832,350 | 122 | 141,533,500 | | | | | | | 100 | 83.87 | 93.85 | 88.46 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi | 50 | 50,000,000 | 75 | 55,180,000 | | | | | | 50 | 31,724,000 | 75 | 49,971,500 | | | | | | 100 | 63.45 | 100 | 90.56 | | | | |
| Kegiatan Peningkatan Kemampuan Manajemen Pekoperasian | 350 | 140,000,000 | 305 | 76,089,400 | | | | | | 350 | 118,002,000 | 305 | 57,571,850 | | | | | | 100 | 84.29 | 100 | 75.66 | | | | |
| Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian KSP/USP Koperasi | 20 | 20,000,000 | 30 | 30,000,000 | | | | | | 20 | 17,374,200 | 30 | 27,877,000 | | | | | | 100 | 86.87 | 100 | 92.92 | | | | |
| Kegiatan Peringatan Hari Koperasi | 0 | - | 0 | - | | | | | | 0 | - | 0 | - | | | | | | - | - | - | - | | | | |
| Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi | 74 | 640,000,000 | 85 | 622,083,800 | | | | | | 73 | 563,215,319 | 77 | 436,914,950 | | | | | | 98.65 | 88 | 90.59 | 70.23 | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel Koperasi | 50 | 40,000,000 | 0 | - | | | | | | 50 | 39,970,000 | 0 | - | | | | | | 100 | 99.93 | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|--|-----|-------|-----|-------|--|--|--|--|
| Kegiatan Fasilitasi Permodalan usaha simpan pinjam Koperasi | 40 | 20,000,000 | 0 | - | | | | | | 40 | 19,730,000 | 0 | - | | | | | 100 | 98.65 | - | - | | | | |
| Kegiatan Penguatan Manajemen Usaha Koperasi | 50 | 50,000,000 | 0 | - | | | | | | 50 | 48,590,000 | 0 | - | | | | | 100 | 97.18 | - | - | | | | |
| Kegiatan Monitorin, evaluasi dan pelaporan | 50 | 20,000,000 | 50 | 20,000,000 | | | | | | 40 | 19,565,000 | 50 | 16,008,400 | | | | | 80 | 97.83 | 100 | 80.04 | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Konsultasi Usaha Koperasi | 40 | 40,000,000 | 0 | - | | | | | | 40 | 25,550,000 | 0 | - | | | | | 100 | 63.88 | - | - | | | | |
| Kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah | 200 | 470,000,000 | 158 | 491,010,000 | | | | | | 200 | 409,810,319 | 158 | 420,906,550 | | | | | 100 | 87.19 | 100 | 85.72 | | | | |
| Kegiatan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (DID -T) | 0 | - | 50 | 106,643,800 | | | | | | | | 50 | 104,818,100 | | | | | - | - | 100 | 98.29 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|--|-----|------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|-------|--|--|--|--|
| Kegiatan Peningkatan jaringan antar lembaga | 200 | 86,000,000 | 40 | 94,000,000 | | | | | 400 | 83,305,000 | 40 | 93,223,300 | | | | | | 200 | 96.87 | 100 | 99.17 | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro | 10 | 40,000,000 | 0 | - | | | | | 10 | 30,677,800 | 0 | - | | | | | | 100 | 76.69 | - | - | | | | |
| Kegiatan Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan | 60 | 15,000,000 | 70 | 17,000,000 | | | | | 60 | 13,982,700 | 70 | 13,148,500 | | | | | | 100 | 93.22 | 100 | 77.34 | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi Permasalahan proses Produksi UMKM | 160 | 100,000,000 | 85 | 197,000,000 | | | | | 320 | 97,175,000 | 85 | 127,112,100 | | | | | | 200 | 97.18 | 100 | 64.52 | | | | |
| Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro | 40 | 60,000,000 | 100 | 183,500,000 | | | | | 80 | 57,580,300 | 100 | 150,282,000 | | | | | | 200 | 95.97 | 100 | 81.9 | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi Permasalahan proses Produksi UMKM (DID-T) | | | 50 | 107,768,600 | | | | | | | 50 | 107,768,600 | | | | | | - | - | 100 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Kegiatan Biaya Pendampingan Fasilitasi Permasalahan proses Produksi UMKM DID-T | | | 50 | 6,908,000 | | | | | | | 50 | 4,570,000 | | | | | | - | - | 100 | 66.16 | | | | |
| Kegiatan Pengembangan promosi produk usahakecil menengah (DID-T) | | | 20 | 176,283,700 | | | | | | | 20 | 160,006,000 | | | | | | - | - | 100 | 90.77 | | | | |
| Kegiatan Biaya Pendampingan Pengembangan promosi produk usahakecil menengah DID-T | | | 20 | 8,316,000 | | | | | | | 20 | 4,490,000 | | | | | | - | - | 100 | 53.99 | | | | |
| Kegiatan Fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro (DID-T) | | | 125 | 349,892,900 | | | | | | | 125 | 303,792,900 | | | | | | - | - | 100 | 86.82 | | | | |
| Kegiatan Biaya Pendampingan Fasilitasi standarisasi produk Usaha Mikro DID-T | | | 125 | 6,908,000 | | | | | | | 125 | 5,090,000 | | | | | | - | - | 100 | 73.68 | | | | |
| Program Penumbuhan Wirausaha baru | 23 | 200,000,000 | 28 | 578,328,400 | | | | | 23 | 199,605,500 | 31 | 482,410,850 | | | | | | 100 | 99.8 | 110.7 | 83.41 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|-----|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| Kegiatan Peningkatan kewirausahaan berbasis potensi lokal | 200 | 200,000,000 | 250 | 334,275,000 | | | | | | 200 | 199,605,500 | 250 | 271,894,900 | | | | | | 100 | 99.8 | 100 | 81.34 | - | - | - | - |
| Kegiatan Peningkatan kewirausahaan berbasis potensi lokal (DID-T) | | | 70 | 223,329,400 | | | | | | | | 70 | 197,010,950 | | | | | | - | - | 100 | 88.22 | | | | |
| Kegiatan Biaya Pendampingan Peningkatan kewirausahaan berbasis potensi lokal DID-T | | | 70 | 20,724,000 | | | | | | | | 70 | 13,505,000 | | | | | | - | - | 100 | 65.17 | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 77 | 491,594,000 | 80 | 367,973,875 | | | | | | 77 | 464,479,278 | 81 | 365,652,770 | | | | | | 100 | 94.48 | 101.3 | 99.37 | | | | |
| Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 196,594,000 | 100 | 202,973,875 | | | | | | 100 | 189,389,295 | 100 | 202,662,222 | | | | | | 100 | 96.34 | 100 | 99.85 | | | | |
| Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 100 | 265,000,000 | 12 | 145,000,000 | | | | | | 100 | 249,809,483 | 12 | 143,638,048 | | | | | | 100 | 94.27 | 100 | 99.06 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|-----|-------|-----|-------|--|--|--|--|
| Survey Kepuasan Masyarakat | 1 | 30,000,000 | 1 | 20,000,000 | | | | | | 1 | 25,280,500 | 1 | 19,352,500 | | | | | 100 | 84.27 | 100 | 96.76 | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 307,156,000 | 100 | 82,800,000 | | | | | | 100 | 298,192,091 | 100 | 81,135,293 | | | | | 100 | 97.08 | 100 | 97.99 | | | | |
| Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 0 | - | 0 | - | | | | | | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | - | - | | | | |
| Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor | 1 | 142,156,000 | 3 | 5,000,000 | | | | | | 1 | 141,408,300 | 0 | 5,000,000 | | | | | 100 | 99.47 | 0 | 100 | | | | |
| Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 0 | - | 0 | - | | | | | | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | - | - | | | | |
| Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor | 0 | - | 0 | - | | | | | | 0 | - | 0 | - | | | | | - | - | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 12 | 85,000,000 | 10 | 77,800,000 | | | | | | 12 | 78,641,791 | 10 | 76,135,293 | | | | | | 100 | 92.52 | 100 | 97.86 | | | | |
| Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 1 | 80,000,000 | 0 | - | | | | | | 1 | 78,142,000 | 0 | - | | | | | | 100 | 97.68 | - | - | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | 90,000,000 | 0 | - | | | | | | 100 | 85,023,181 | 0 | - | | | | | | 100 | 94.47 | - | - | | | | |
| Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal | 30 | 90,000,000 | 0 | - | | | | | | 30 | 85,023,181 | 0 | - | | | | | | 100 | 94.47 | - | - | | | | |
| Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 33,000,000 | 100 | 28,000,000 | | | | | | 100 | 33,000,000 | 100 | 25,300,000 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 90.36 | - | - | - | - |
| Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 8 | 30,000,000 | 8 | 25,000,000 | | | | | | 8 | 30,000,000 | 8 | 22,300,000 | | | | | | 100 | 100 | 100 | 89.2 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----------|----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------|---|-----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | | | | | | 2 | 3,000,000 | 2 | 3,000,000 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | 58 | 48,474,000 | 62 | 58,000,000 | 65 | 48,000,000 | | | | 58 | 47,414,000 | 62 | 44,790,000 | - | - | - | - | 100 | 98 | 100 | 77 |
| Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | 66 | 48,474,000 | 70 | 58,000,000 | 66 | 48,000,000 | | | | 66 | 47,414,000 | 70 | 44,790,000 | - | - | - | - | 100 | 98 | 100 | 77 |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | 75 | 231,515,250 | 77 | 209,350,000 | 80 | 364,600,250 | | | | 75 | 225,276,250 | 77 | 196,060,000 | | | | | 100 | 97 | 100 | 94 |
| Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | ## | 231,515,250 | 100 | 209,350,000 | 100 | 364,600,250 | | | | 100 | 225,276,250 | 100 | 196,060,000 | | | | | 100 | 97 | 100 | 94 |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | 38 | 459,181,000 | 43 | 404,200,000 | 43 | 462,370,000 | | | | 38 | 419,175,300 | 43 | 386,249,200 | | | | | 100 | 91 | 100 | 96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|--|--|----|-------------|----|-------------|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|----|
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 12 | 196,806,800 | 12 | 276,934,000 | 12 | 283,366,150 | | | | 12 | 182,301,141 | 12 | 271,532,822 | | | | | | | 100 | 93 | 100 | 98 |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 0 | - | 1 | 25,756,000 | 0 | - | | | | 0 | - | 1 | 25,357,400 | | | | | | | - | - | 100 | 98 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 12 | 142,646,000 | 12 | 142,284,010 | 12 | 151,000,000 | | | | 12 | 131,683,582 | 12 | 133,302,610 | | | | | | | 100 | 92 | 100 | 94 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3 | 90,200,000 | 3 | 124,608,600 | 3 | 150,000,000 | | | | 3 | 87,345,092 | 3 | 123,343,057 | | | | | | | 100 | 97 | 100 | 99 |

Anggaran dan target renstra tahun 2019 dan 2021 program untuk urusan koperasi tidak tercapai karena disesuaikan dengan dinamika permasalahan di Kabupaten Magetan pada Umumnya dan di Dinas Koperasi dan UM khususnya salah satunya adanya COVID, sedangkan untuk bidang UMKM semua tercapai dengan baik, walaupun covid ternyata justru target bias tercapai karena banya usaha mikro yang melakukan trobosan lain dengan berjualan melalui online.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan, antara lain :

1. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi dan Usaha Mikro
2. Kecepatan pelayanan perijinan kepada pelaku koperasi dan usaha mikro.
3. Usaha koperasi dan usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam
5. Perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan usaha yang berkesinambungan.
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan perangkat daerah sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat.
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
- Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
- Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
- Masih adanya Asosiasi/Paguyuban yang belum dimanfaatkan oleh UMKM.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Aspek Sumber Pembiayaan.

- Pada umumnya Koperasi dan UMKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
- Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
- Hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.
- Rendahnya akses permodalan bagi pelaku Koperasi dan UMKM terhadap lembaga keuangan.

c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi).

- Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk
- Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
- Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar
- Produk unggulan lokal belum berdaya saing
- Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran

- d. Aspek SDM dan Pelaku UMKM/Koperasi.
 - Kurangnya jiwa wirausaha pelaku koperasi dan usaha mikro
 - Kurangnya pengetahuan anggota tentang tatacara berkoperasi yang benar
 - Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi
- e. Aspek manajemen koperasi dan usaha mikro.
 - Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya
 - Kurang Optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Retail koperasi
 - Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal
 - Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen koperasi dan UMKM
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain Produk, Sertifikasi Produk dan lain-lain.
 - Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya
 - Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi
- g. Pengelolaan Program Strategis Provinsi (Koperasi Wanita)

Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Kopwan yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026

Tujuan I RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi II dan Misi IV RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Tujuan pertama RPD Kabupaten Magetan fokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang bertumpu terhadap potensi unggulan daerah serta potensi investasi yang masih besar untuk dieksplorasi. Dinas Koperasi dan UM masuk dalam Tujuan pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan dan masuk sasaran pertama meningkatnya kontribusi sektor unggulan kabupaten Magetan.

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Telaahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan berdasarkan Sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UM
Kabupaten Magetan berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Renstra Kementerian KUKM | Permasalahan Pelayanan Dinkop UM Kab. Magetan | Faktor | |
|----|---|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentral di sektor-sektor unggulan | Kurang Sinergitas diantara stakeholder terhadap pengembangan KUMKM | SDM yang belum optimal | Komitmen dalam Pemberdayaan koperasi dan UMKM |
| 2 | Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah | Kurang optimalnya perhatian pelaku UMKM terhadap standarisasi produk yang dipasarkan | Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar Internasional | Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan Menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM |
| 3 | Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan | Kurangnya penguasaan TI untuk meperluas akses pasar, dan akses permodalan | Kebanyakan Koperasi dan UMKM Menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk dan KUMKM yang belum bankable | Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi |
| 4 | Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat. | Kurangnya diklat/kursus di bidang perkoperasian. | Kurang kapasitas SDM di bidang perkoperasian | Banyaknya jumlah Koperasi yang ada di semua lapisan masyarakat. |

Hasil review terhadap telahaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakanstrategis dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpah tindih program dan kegiatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Provinsi Jawa Timur.

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
3. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB
4. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru dan Omset UMKM di Sentra
5. Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM
6. Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, telahaan struktur ruang wilayah sebagai berikut :

1. Penelaahan Rencana Struktur Ruang
2. Deskripsi Tabel Rencana Struktur Ruang
3. Menelaah Rencana Pola Ruang

Adapun hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian dan industri.
2. Pengembangan industry kecil/menengah yang potensial (agroindustri), pengembangan usaha/industry kerajinan potensial, penguatan pangsa pasar, perlindungan pada usaha ekonomi lemah, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dan peningkatan ketrampilan SDM sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi.
3. Pengembangan KUMKM agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktifitas serta daya saing dan kemandirian UMKM di pasar dalam/luar negeri, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan komoditas perkebunan.
4. Pengembangan komoditas unggulan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agrobisnis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya persentase koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat
- b. Rendahnya daya saing produk usaha mikro
- c. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru dan usaha mikro
- d. Minimnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro
- e. Kurangnya promosi dan pemasaran produk usaha mikro

- f. Minimnya diversifikasi usaha koperasi dan usaha mikro
- g. Kurangnya kompetensi SDM pelaku koperasi dan usaha mikro

Tabel 3.2
Identifikasi Isu Strategis

| No | Tingkat Isu | Isu Strategis | Faktor Penentu Keberhasilan |
|-----------|--------------------|---|--|
| 1. | Internasional | Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar | Keunggulan kompetitif produk KUMKM dan keterpihakan pemangku kebijakan terhadap pengembangan KUMKM |
| 2, | Nasional | Masih kurangnya wirausaha baru yang layak dan berkelanjutan. | Peningkatan jiwa kewirausahaan dan peningkatan kemampuan memperluas pasar. |
| 3. | Daerah | Rendahnya kualitas KUMKM yang berakibat pada kurangnya daya saing KUMKM | Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi, Peningkatan pengembangan KUMKM, dan Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

1.1.1. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapaun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 -2026 yaitu : **Meningkatnya Omset Koperasi dan Usaha Mikro.**

Sedangkan untuk menilai keberhasilan tujuan ini, pada akhir periode Renstra dapat diukur dengan indikator : Nilai Omset koperasi dan Usaha Mikro .

1.1.2. Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik dan terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel TC. 25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
 Tahun 2024 – 2026

Sebelum Perubahan

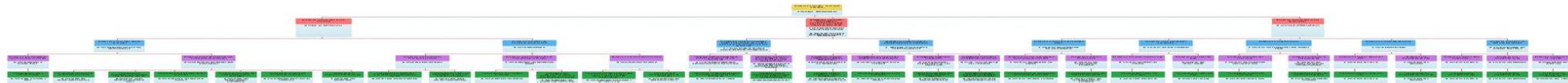
| No | Tujuan | 3 | Sasaran | 5 | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | |
|----|---|-----|---|-------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro | | | 1.1 | Nilai omset koperasi (juta rupiah) | 832.222,8 | 848.867,3 | 865.844,6 |
| | | | | 1.2 | Nilai omset usaha mikro yg dibina (Juta Rupiah) | 320.634 | 323.334 | 325.584 |
| | | 1.1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 1.1.1 | Persentase koperasi yang berkualitas | 70 | 73 | 75 |
| | | 1.2 | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina | 1.2.1 | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik pada urusan Koperasi dan UKM | | | 2.1. | Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan Koperasi dan UKM | 80 | 80,1 | 80,5 |
| | | 2.1 | Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik pada urusan Koperasi dan UKM | 2.1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan Koperasi dan UKM | 80 | 80,1 | 80,5 |

Sesudah Perubahan

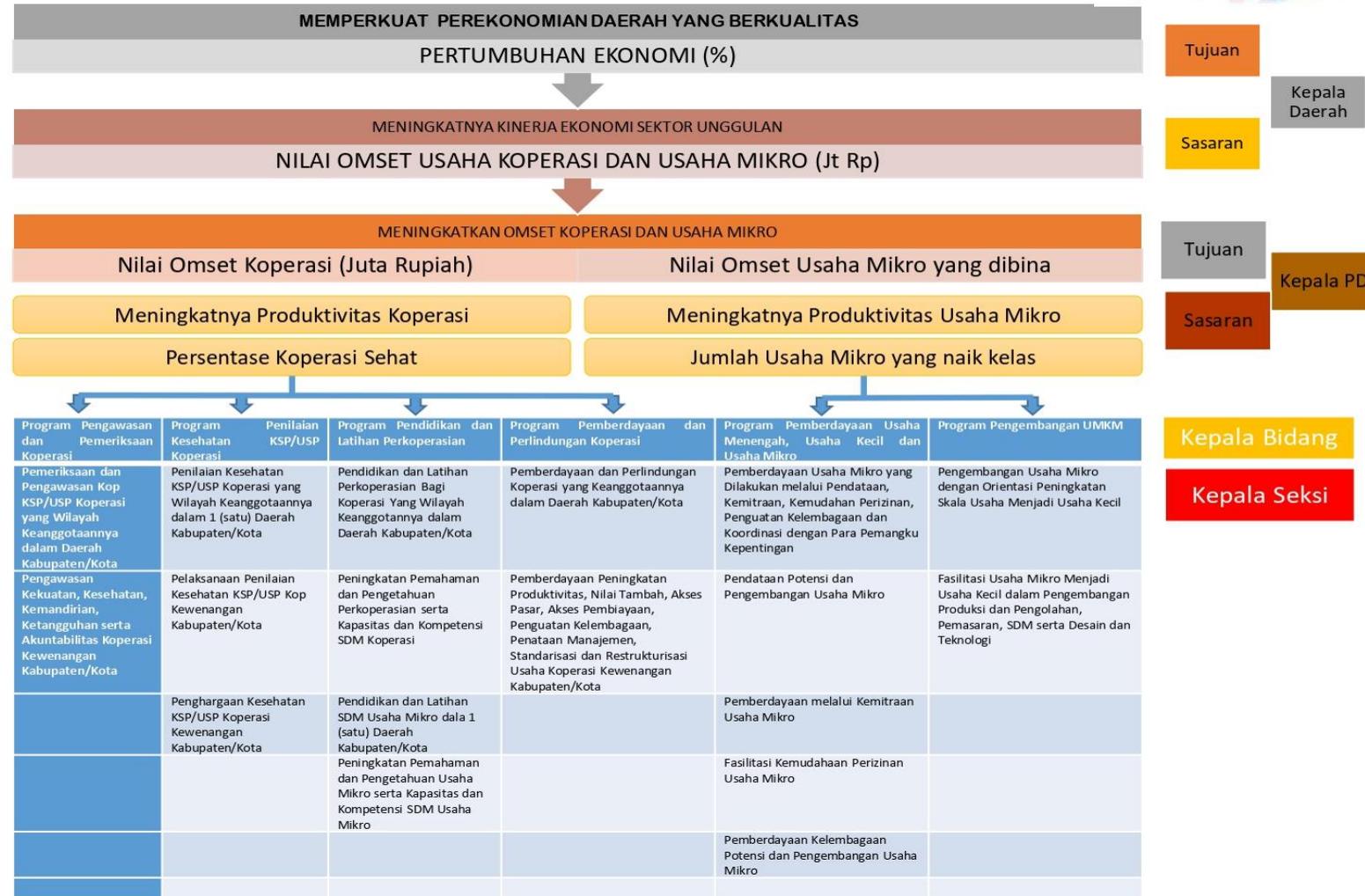
| No | Tujuan | | Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - | | | | |
|----|---|-----|---|-------|---|---|------------------------------------|-----------|----|----|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro | | | 1.1 | Nilai omset koperasi (juta rupiah) | 832.222,8 | 848.867,3 | 865.844,6 | | |
| | | | | 1.2 | Nilai omset usaha mikro yg dibina (Juta Rupiah) | 320.634 | 323.334 | 325.584 | | |
| | | | | 1.1 | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | 1.1.1 | Persentase koperasi Sehat | 70 | 73 | 75 |
| | | | | 1.2 | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | 1.2.1 | Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas | 2 | 3 | 4 |
| | | 1.3 | Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM | 1.3.1 | Nilai SAKIP Dinas Koperasi dan UKM | 91,3 | 91,5 | 91,9 | | |
| | | | | 1.3.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi UKM | 83 | 83,5 | 84 | | |

4.2 Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



4.3 Cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi
2. Peningkatan pengembangan KUMKM
3. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UMKM, dan pengembangan usaha KUMKM.
3. Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran.

Adapun hasil rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan terhadap setiap sasaran yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel TC. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|--|
| Meningkatkan Omset Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya Produktivitas koperasi | Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi |
| | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | Peningkatan pengembangan KUMKM | Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UMKM, dan pengembangan usaha KUMKM |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan Publik penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM</p> | <p>Peningkatan Kualitas Koperasi dan UMKM</p> | <p>Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran</p> |
|--|--|---|---|

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel 5.1 yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2024-2026. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan **outcome**. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (**output**) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan proyeksi capaian tahun 2019. Target kinerja program/kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adanya perubahan tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah maka kami lakukan perubahan rencana program, kegiatan serta sub kegiatan dan pendanaannya yang mana secara rinci disajikan melalui tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel TC. 27
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
Tahun 2024 – 2026

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|--|--|------|--|---|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | 2 | | URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | DINKOP | | |
| | | 2 | 17 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | 4,964,889,939 | | 5,299,889,939 | | 7,564,889,939 | | 17,829,669,817 | | DINKOP | | |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Koperasi UKM | 2 | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 80 | 80 | 3,149,889,939 | 80.1 | 3,149,889,939 | 81 | 3,149,889,939 | 81 | 9,449,669,817 | | DINKOP | |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 8 | 45,000,000 | 8 | 45,000,000 | 8 | 30,000,000 | 24 | 120,000,000 | DINKOP | |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,000,000 | 4 | 20,000,000 | 12 | 90,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 12 | 30,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2 | 87 | 2,328,389,939 | 88 | 2,328,389,939 | 89 | 2,328,389,939 | 264 | 6,985,169,817 | DINKOP | |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | 294 | 2,323,889,939 | 378 | 2,323,889,939 | 450 | 2,323,889,939 | 1.122 | 6,971,669,817 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|--------|---------|------|--|--|--------------------|--|---|---|----|--------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|-----|---------------|--------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD // Laporan | 2 | 2 | 4,500,000 | 2 | 4,500,000 | 2 | 4,500,000 | 6 | 13,500,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur // Orang | 50 | 30 | 35,000,000 | 30 | 35,000,000 | 30 | 50,000,000 | 90 | 120,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan // orang | 50 | 30 | 35,000,000 | 30 | 35,000,000 | 30 | 50,000,000 | 90 | 120,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah // Paket | 12 | 12 | 382,000,000 | 66 | 382,000,000 | 66 | 382,000,000 | 144 | 1,146,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan // Paket | 12 | 4 | 7,500,000 | 4 | 7,500,000 | 4 | 7,500,000 | 12 | 22,500,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan // Paket | 12 | 7 | 125,000,000 | 7 | 125,000,000 | 7 | 125,000,000 | 21 | 375,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan // Paket | 12 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 12 | 30,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan // Paket | 12 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,000,000 | 12 | 105,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan // Paket | 12 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 36 | 45,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan // Dokumen | 12 | 24 | 7,500,000 | 24 | 7,500,000 | 24 | 7,500,000 | 72 | 22,500,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD // Laporan | 12 | 12 | 182,000,000 | 12 | 182,000,000 | 12 | 182,000,000 | 36 | 546,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|-----------------|--|--|--------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | 2 17 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan | 12 | 12 | 159,500,000 | 12 | 159,500,000 | 12 | 159,500,000 | 36 | 478,500,000 | DINKOP |
| | | 2 17 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan // Dokumen | 12 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,000,000 | 4 | 35,000,000 | 12 | 105,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan // Laporan | 12 | 4 | 12,500,000 | 4 | 12,500,000 | 4 | 12,500,000 | 12 | 37,500,000 | DINKOP |
| | | 2 17 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan // Laporan | 12 | 4 | 112,000,000 | 4 | 112,000,000 | 4 | 112,000,000 | 12 | 336,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit | 4 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 12 | 600,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya // Unit | 3 | 3 | 100,000,000 | 3 | 100,000,000 | 3 | 100,000,000 | 9 | 300,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi // Unit | 1 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 3 | 300,000,000 | DINKOP |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | 2 17 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Koperasi yang memiliki ijin Usaha | 0 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 30 | 150,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 02 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ijin Usaha yang dimiliki koperasi // Unit | 0 | 3 | 25,000,000 | 3 | 25,000,000 | 3 | 25,000,000 | 9 | 75,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|-------------------------------------|------|----|----|------|----|--|---|--------------------|--|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | 2 | 17 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan KasCabang, Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota // Unit Usaha | 0 | 15 | 25,000,000 | 15 | 25,000,000 | 15 | 25,000,000 | 45 | 75,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 02 | 2.02 | | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Ijin Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas yang dimiliki koperasi // Unit | 0 | 2 | 25,000,000 | 2 | 25,000,000 | 2 | 25,000,000 | 6 | 75,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor cabang, cabang pembantu dan kantorkas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota // Unit Usaha | 0 | 15 | 25,000,000 | 15 | 25,000,000 | 15 | 25,000,000 | 45 | 75,000,000 | DINKOP |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Jumlah Koperasi aktif | 65 | 555 | 70,000,000 | 560 | 120,000,000 | 563 | 120,000,000 | 72 | 310,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang periksa dan diawasi // Koperasi | 5 | 60 | 70,000,000 | 60 | 80,000,000 | 60 | 100,000,000 | 180 | 250,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|-------------------------------------|-----------------|--|---|--------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | 2 17 03 2.01 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota // Unit Usaha | 30 | 30 | 35,000,000 | 30 | 40,000,000 | 30 | 50,000,000 | 90 | 125,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 03 2.01 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota // Unit Usaha | 45 | 30 | 35,000,000 | 30 | 40,000,000 | 30 | 50,000,000 | 90 | 125,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 03 2.01 03 | Pengutan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi // Unit usaha | 30 | 30 | 35,000,000 | 30 | 40,000,000 | 30 | 50,000,000 | 90 | 125,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 03 2.01 04 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan // Unit Usaha | 45 | 30 | 35,000,000 | 30 | 40,000,000 | 30 | 50,000,000 | 90 | 125,000,000 | DINKOP |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | 2 17 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya | 80 | 35 | 550,000,000 | 35 | 660,000,000 | 35 | 770,000,000 | 105 | 1,980,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 04 2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang dibina // Koperasi | 100 | 35 | 200,000,000 | 35 | 200,000,000 | 35 | 220,000,000 | 105 | 620,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 04 2.01 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian Kesehatan // Unit usaha | 75 | 35 | 35,000,000 | 35 | 35,000,000 | 50 | 50,000,000 | 120 | 120,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|-------------------------------------|-----------------|--|--|--------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | 2 17 04 2.01 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan // Unit usaha | 100 | 100 | 165,000,000 | 100 | 165,000,000 | 100 | 170,000,000 | 300 | 500,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 04 2.01 03 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan // Unit Usaha | 100 | 100 | 165,000,000 | 100 | 165,000,000 | 100 | 170,000,000 | 300 | 500,000,000 | DINKOP |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | 2 17 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan // % | 43 | 18 | 100,000,000 | 20 | 150,000,000 | 22 | 150,000,000 | 22 | 400,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 05 2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan // koperasi | 100 | 25 | 50,000,000 | 50 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | 125 | 250,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 05 2.01 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian // Orang | 100 | 25 | 50,000,000 | 50 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | 125 | 250,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 05 2.03 | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pendidikan dan pelatihan // usaha mikro | 25 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 50 | 150,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 05 2.03 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah SDM yang memahami tentang usaha mikro // Orang | 25 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 50 | 150,000,000 | DINKOP |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Produktivitas Koperasi | 2 17 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah koperasi yang berkembang usahanya | 20 | 20 | 140,000,000 | 30 | 170,000,000 | 50 | 225,000,000 | 100 | 535,000,000 | DINKOP |
| | | 2 17 06 2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan // Koperasi | 50 | 100 | 140,000,000 | 100 | 170,000,000 | 100 | 225,000,000 | 300 | 535,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------|---------|------|----|----|------|----|---|--|--------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha koperasiKewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota // Unit usaha | 50 | 125 | 125,000,000 | 150 | 150,000,000 | 150 | 200,000,000 | 425 | 475,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 02 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya // keluarga | 0 | 25 | 15,000,000 | 35 | 20,000,000 | 50 | 25,000,000 | 110 | 60,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 03 | Pembinaan dan Pendampingan bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi | Pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan // Kelompok Masyarakat | 0 | 25 | 10,000,000 | 25 | 10,000,000 | 30 | 15,000,000 | 80 | 35,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang difasilitasi kemitraannya // Unit Usaha | 0 | 25 | 20,000,000 | 25 | 25,000,000 | 30 | 35,000,000 | 80 | 80,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 05 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha // Unit Usaha | 0 | 25 | 25,000,000 | 25 | 35,000,000 | 30 | 50,000,000 | 80 | 110,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 06 | Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya // Unit Usaha | 0 | 25 | 20,000,000 | 25 | 25,000,000 | 30 | 30,000,000 | 80 | 75,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|---|--|------|----|----|------|----|---|---|--------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota // Unit Usaha | Jumlah Koperasi yang difasilitasi Permodalannya // Unit Usaha | 0 | 25 | 20,000,000 | 25 | 20,000,000 | 30 | 25,000,000 | 80 | 65,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 08 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya // Unit Usaha | 0 | 25 | 15,000,000 | 25 | 15,000,000 | 30 | 20,000,000 | 80 | 50,000,000 | DINKOP |
| Meningkatkan omset koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentasi UMKM yang telah diberdayakan (%) | 30 | 30 | 455,000,000 | 32 | 500,000,000 | 34 | 2,550,000,000 | 34 | 3,505,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan // Usaha Mikro | 300 | 50 | 455,000,000 | 50 | 500,000,000 | 50 | 550,000,000 | 750 | 1,505,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro // Dokumen | 2 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 75,000,000 | 3 | 175,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro // Unit Usaha | 125 | 50 | 100,000,000 | 50 | 100,000,000 | 50 | 125,000,000 | 150 | 325,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perijinan // unit usaha | 40 | 25 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 75 | 75,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro // unit usaha | 175 | 50 | 75,000,000 | 50 | 100,000,000 | 50 | 120,000,000 | 150 | 295,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 06 | Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan // unit usaha | 0 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 300 | 150,000,000 | DINKOP |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | | | | | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | Baseline (2023) | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|--|--|------|----|----|------|----------|---|--|--------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 08 | Pemulihan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha | 0 | 25 | 100,000,000 | 25 | 120,000,000 | 25 | 125,000,000 | 75 | 345,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha | 0 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 75 | 150,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha | 0 | 25 | 30,000,000 | 25 | 30,000,000 | 25 | 30,000,000 | 75 | 90,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 0 | 50 | 75,000,000 | 50 | 75,000,000 | 50 | 75,000,000 | 150 | 225,000,000 | DINKOP |
| Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang dibina | 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Presentase UMKM yang naik kelas // % | 0 | 0,9 | 450,000,000 | 1 | 500,000,000 | 1 | 550,000,000 | 1 | 1,500,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang dibina untuk naik kelas // usaha mikro | 0 | 10 | 450,000,000 | 10 | 500,000,000 | 10 | 550,000,000 | 10 | 1,500,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SSDM, serta Desain dan Teknologi // unit usaha | 100 | 100 | 450,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 550,000,000 | 300 | 1,500,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 000 2 | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi //Unit Usaha | 0 | 100 | 100,000,000 | 100 | 125,000,000 | 100 | 150,000,000 | 300 | 375,000,000 | DINKOP |
| | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 000 3 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan | Jumlah yang difasilitasi | 0 | 100 | 150,000,000 | 100 | 175,000,000 | 100 | 150,000,000 | 300 | 475,000,000 | |
| | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 000 6 | Produksi dan Pengolahan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Tehnologi | 0 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 250,000,000 | 300 | 650,000,000 | DINKOP |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 3 (Tiga) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mendukung tercapainya tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Yang Mandiri.

Tabel di bawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang mengacu pada Sasaran SKPD Tahun 2024-2026.

Tabel TC. 28

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Sasaran Dinas Koperasi dan UM

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal | Target capaian setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---------------------------|-----------------------------|------|------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Koperasi <i>Persentase koperasi sehat</i> | 0 | 70 | 73 | 75 | 75 |
| 2 | Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro <i>Jumlah usaha mikro yang naik kelas</i> | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Table 7.1 IKU
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Magetan

| Sasaran | Indikator Kinerja | Rumus Perhitungan |
|--|------------------------------------|--|
| Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Koperasi sehat | $\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya}} \times 100 \%$ |
| Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas | Jumlah Usaha mikro yang naik kelas pada tahun n |

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan pada tahun 2024-2026.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Magetan,

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

